



RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Renja Disnaker Kota Tangerang Tahun 2025 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025, RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026, Renstra Disnaker Kota Tangerang Tahun 2024-2026 dan Rancangan Akhir RKPD Kota Tangerang Tahun 2025.

Renja Disnaker ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi tujuan dan sasaran Rencana Strategis Disnaker Tahun 2024-2026 serta program dan kegiatan Disnaker Tahun 2025. Selanjutnya program dan kegiatan merupakan kebutuhan kinerja yang akan dilaksanakan Disnaker berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan.

Semoga Renja yang telah diselesaikan ini dapat dijadikan pedoman bagi pegawai Disnaker dalam memenuhi target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, agar mampu memberikan kontribusi positif bagi kinerja Pemerintah Kota Tangerang.

Tangerang, Agustus 2024

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN

UJANG HENDRA GUNAWAN, S.Sos, MM
NIP. 19720502 200212 1009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD	37
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025	42
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	70
BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	71
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	71
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disnaker	73
3.3. Program dan Kegiatan	75
BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	91
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	91
BAB 5. PENUTUP	112

DAFTAR TABEL

BAB 2

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat sampai dengan tahun 2023.....	10
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2023	32
Tabel 2.3.	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Kota Tangerang....	44

BAB 3

Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan.....	74
Tabel 3.2.	Rumusan dan Rencana Program Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	77

BAB 4

Tabel 4.1.	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	92
------------	---	----

**DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA TANGERANG**

DAFTAR GAMBAR

BAB 2

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang..... 24



DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Disnaker Kota Tangerang Tahun 2025 nantinya merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis Disnaker Tahun 2024-2026. Renja SKPD disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renja secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Renja Disnaker disusun dengan mengacu pada Rancangan Akhir RKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan.

Rancangan Akhir Renja Disnaker memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Disnaker disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyiapan penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD, meliputi pembentukan tim

- penyusun Renja SKPD, orientasi Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi;
2. Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD, mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir RKPDP;
 3. Pelaksanaan Forum SKPD, merupakan pembahasan rancangan Renja SKPD antara pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan;
 4. Penetapan Rancangan Akhir Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Disnaker Tahun 2025, dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renja, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2032;
 19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8);
 21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3);
 22. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 133 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.

23. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rancangan Akhir Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra dan mengacu kepada RPKD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Akhir Renja Disnaker dimaksudkan untuk memberi pedoman, arahan dan acuan bagi Disnaker dalam urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Disnaker adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2025;
2. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Disnaker Kota Tangerang Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RPKD, Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB 2. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RPKD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan

antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan.

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB 5. PENUTUP



**DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA TANGERANG**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD tahun berjalan yang baru disahkan.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

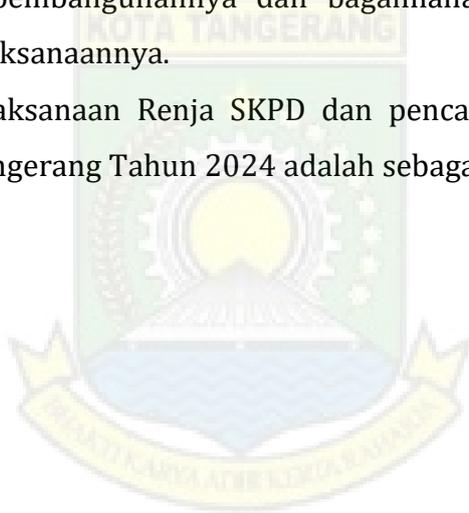
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan.

Review capaian prioritas dan target program Renstra SKPD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program.
2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra SKPD.
3. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra SKPD dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan daripelaksanaannya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :



DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA TANGERANG

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah :
Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d akhir Renstra (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9			10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN WAJIB											
2 07	KETENAGAKERJAAN											
2 07 02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga Kerja	300	100	100	100	100%	100	50	50%	300	100%
	2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	6	2	2	2	100%	2	1	50%	6	100%
	01 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	1	1	1	100%	1	1	100%	1	100%
	02 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	90	-	-	-	-	30	-	-	-	-

*Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025*

2	07	03		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja terlatih yang bersertifikat kompetensi	85,71	98,89	51,35	63,58	123,81%	75	-	-	75	87,50%
			2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	60	20	20	20	100%	26	5	19%	66	110%
			01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1140	1163	370	456	123,24%	380	79	20,79%	1999	175,35%
			02	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	90	0	0	0	0	30	0	-	30	33,33%
			03	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	96	0	-	-	0	32	-	-	32	33,33%
			2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12	-	-	-	-	4	1	25%	4	33,33%
			01	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15	-	-	-	-	5	5	100%	5	33,33%
			2.0.3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	3	-	-	-	-	1	-	-	1	33,33%

*Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025*

				Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15	-	-	-	-	5	5	100%	5	33,33%
			2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	3	-	-	-	-	1			1	33,33%
				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	300	-	-	-	-	100			100	33,33%
			205	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3					1	-	-	1	33,33%
			01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	840					280	-	-	280	33,33%
2	07	04		Program Penempatan Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan	99,24%	98,89%	81,88%	100%	122,13%	98,46%	85,85%	87,19%	98,46%	99,21%
			201	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	6					2			2	33,33%
			03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20250					6750	-	-	6750	33,33%
			05	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	2520					840			840	33,33%

*Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025*

			203	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	36	12	12	12	100,00	12	3	25,00	36	100%
			03	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	15000	6978	5000	5030	100,6	5000	113	2,26	17008	113,39%
			204	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	9					3			3	33,33%
			03	Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	660	113	40	184	460	170			507	76,82%
2	07	05		Program Hubungan Industrial	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	66,67	71,43	65,35	100	100	153,02	69,23	-	69,23	96,92%
			201	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	4	4	4	100	4	1	25	12	100%
			01	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	390	120	120	120	100,00	130	-	-	370	94,87%

**Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025**

			02	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	75	-	-	-	-	25		25	33,33%	
			03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	27	9	9	9	100,00	9	1	11,11	27	100%
			202	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	15	3	4	4	100,00	5	1	20	12	80%
			01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	285	-	50	50	100,00	95	-	-	145	50,88%
			02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	285	90	95	95	100	95			185	64,91%
			03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	36	-	-	-	-	12	1	8,33	12	33,33%

*Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025*

				Buruh serta Non Afiliasi											
			04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	36	12	12	12	100,00	12	2	16,67	36	100%
			05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	180	-	-	-	-	60	-	-	60	33,33%
1	02			URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN											
1	02	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%									
					Tingkat Ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Tingkat Ketersediaan pelaporan dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025*

					Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Tingkat Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27	9	9	9	100%	9	9	100%	27	100%	100%
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27	9	9	9	100%	9	9	100%	27	100%	100%
2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	36	12	12	12	100%	12	3	25%	36	100%	100%

*Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025*

			01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	40	39	39	100%	40	37	92,5%	119	99,17
2	07	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	42	14	14	14	100%	14	4	28,57%	42	100%
			06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	12	12	12	100%	12	3	25%	36	100%
1	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	36	12	12	12	100%	12	3	25%	36	100%
			02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	120	0	0	0	0	40			40	33,33%
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	21	7	7	7	100%	7	7	100%	21	100%
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	0,25	25,00%	3	100%
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	0,50	50,00%	3	100%

**Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025**

			03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	0,25	25,00%	3	100%
			04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	0,25	25,00%	3	100%
			05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	0,75	75,00%	5	100%
			06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36	12	12	12	100%	12	3	25,00%	36	100%
			07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	12	12	12	100%	12	3	25,00%	36	100%
1	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur daerah yang memadai	3	-	-	-	-	1	-	-	1	33,33%
			06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	-	-	-	-	1	-	-	1	33,33%

**Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025**

1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	9	3	3	3	100%	3	3	100%	9	100%
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	12	12	12	100%	12	3	25%	36	100%
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	12	12	100%	12	3	25%	36	100%
			06	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	12	12	100%	12	3	25%	36	100%
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	12	4	4	4	100%	4	4	100%	12	100%
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	19	19	19	100%	19	0,25	1,32%	19	100%
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9	9	9	100%	9	0,25	2,78%	9	100%
			06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	213	71	71	71	100%	71	0,25	0,14%	213	100%

			10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	5	5	5	100%	5	5	100%	15	100%
--	--	--	----	---	--	----	---	---	---	------	---	---	------	----	------



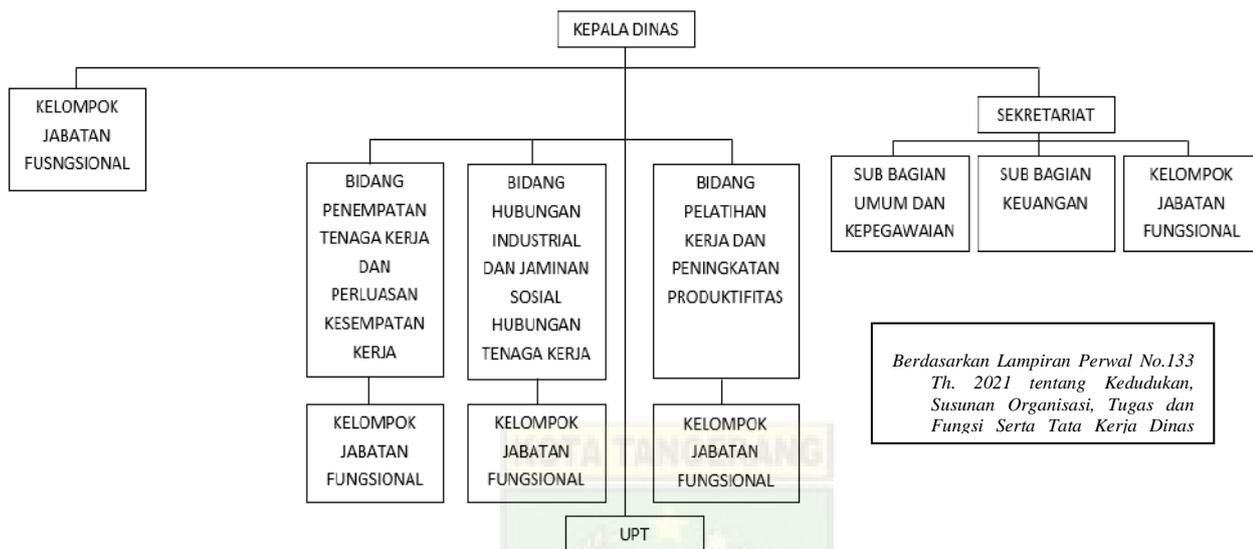
**DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA TANGERANG**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang. Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja,
- d. Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
- e. Bidang Pelatihan kerja dan Peningkatan Produktivitas,
- f. UPT, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3, Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang ketenagakerjaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang ketenagakerjaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenagakerjaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang ketenagakerjaan;
- e. Pengelolaan UPT; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dari masing-masing satuan organisasi (unit kerja) pada Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penatausahaan urusan umum;
- b. penatausahaan urusan kepegawaian;
- c. penatausahaan urusan keuangan;
- d. pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
- e. pengkoordinasian dalam pembangunan dan pengembangan *e-government*; dan
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT-UPT di lingkungan Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Susunan organisasi sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub-Bagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas;
- c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di

lingkungan Dinas;

- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
- i. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan Perangkat Daerah;
- j. melakukan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
- k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah:

- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;
- c. melakukan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

B. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai

tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja;
- b. penyelenggaraan pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- c. penyelenggaraan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja;
- d. penyelenggaraan verifikasi penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- e. penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- f. penyelenggaraan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- g. pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI;
- h. penyelenggaraan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- i. penyelenggaraan pembinaan keberadaan tenaga kerja asing di Daerah;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan Tenaga Kerja Luar Negeri pra dan purna penempatan;
- k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Susunan organisasi Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pembinaan

hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan peryaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja;
- b. penyelenggaraan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan, fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit;
- c. penyelenggaraan upaya-upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- d. penyelenggaraan pengusulan rancangan penetapan Upah Minimum Kota dan sektoral ;
- e. penyelenggaraan pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
- f. penyelenggaraan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- g. penyelenggaraan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi/mediasi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan syarat-syarat kerja; dan
- h. melakukan pendaftaran alur proses, pendaftaran pemborongan pekerjaan, pendaftaran penyedia jasa pekerja/buruh
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Susunan organisasi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas

Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup Pelatihan kerja dan Peningkatan Produktivitas. Bidang Pelatihan kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);

- b. penyelenggaraan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta
- c. penyelenggaraan koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. penyelenggaraan koordinasi pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. penyelenggaraan koordinasi/pemberian tanda daftar Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan di perusahaan;
- f. penyelenggaraan koordinasi / pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- g. penyelenggaraan koordinasi pengukuran dan analisis produktivitas tingkat kota;
- h. penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri terhadap lembaga pelatihan kerja;
- i. penyelenggaraan koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Susunan organisasi Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional, sebagai berikut :

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang

- pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
 - 4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Jabatan fungsional dan Sub-Koordinator, sebagai berikut :

- 1) Pejabat fungsional yang menjadi Koordinator dan/atau Sub-koordinator merupakan jabatan fungsional hasil penyetaraan atau bukan hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- 2) Koordinator dan/atau Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- 3) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan/atau Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota.

Selanjutnya Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan, terdapat penambahan nomenklatur pada pasal 1 sebagai berikut :

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah

6. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
12. Ketua Tim Kerja adalah Pejabat Fungsional atau pelaksana yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

Kemudian pada Pasal 16 diubah menjadi sebagai berikut :

- 1) Ketua Tim Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- 2) Penugasan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Ketua Tim Kerja berpedoman pada peraturan perundang-undang.

Analisis kinerja SKPD disajikan dalam Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi				2023			Proyeksi	
				2019	2020	2021	2022	Target	realisasi	%	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (TPTK)	%								81,88	82,80
	Terwujudnya kesempatan kerja yang luas	Prosentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	%	80,60	80,00	85,92	98,89	81,88	100	122,13	98,84	98,5
		Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	2	2	2	2	2	2	100	2	2
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	orang				6000	6750	6750	100	6750	6750
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	orang				6978	5000	5030	100,6	5000	5000
		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	orang				113	40	184	460	170	220
		Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga Kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	jenis	1	1	1	1	1	1	100	2	2

*Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025*

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi				2023			Proyeksi	
				2019	2020	2021	2022	Target	realisasi	%	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	dokumen	1	1	1	1	1	1	100	1	1
		Jumlah perusahaan yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/ Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	perusahaan								30	30
	Meningkatnya kualitas dan daya saing produktivitas tenaga kerja	Prosentase Tenaga Kerja Terlatih Yang Bersertifikat Kompetensi	%	65,29	20,00	51,43	98,89	51,35	63,58	123,81	98,84	98,84
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	kegiatan	20	5	20	20	20	20	100	20	20
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	360	100	350	343	370	456	123,24	380	380
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	lembaga								30	30
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	unit								32	32
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan	orang				1556	400	867	216,	840	840

*Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025*

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi				2023			Proyeksi	
				2019	2020	2021	2022	Target	realisasi	%	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kesempatan Kerja										
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	lembaga	71	79	80	49	5	5	100	5	5
		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	perizinan								5	5
		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	perusahaan								100	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah	dokumen								280	280
		Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	%	95,33	83,62	65,70	71,43	65,35	100	153,02	69,23	68,00
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	120	120	247	216	120	273	227,5%	130	130
		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan								25	25
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang	Laporan	9	9	9	9	9	9	100%	9	9

*Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025*

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi				2023			Proyeksi	
				2019	2020	2021	2022	Target	realisasi	%	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan										
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara								95	95
		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	100	194	113	95	95	103	108,42	95	95
		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja								12	12
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	lembaga								1	1
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang								60	60

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Berdasarkan uraian di atas teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Disnaker dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. ***Kualitas dan kompetensi tenaga kerja;*** Daya saing tenaga kerja dipengaruhi oleh kualitas dan kompetensi dari tenaga kerja tersebut. Meskipun lowongan kerja yang tersedia cukup besar, namun apabila faktor kualitas SDM tenaga kerja di Kota Tangerang rendah, maka akan dapat mempengaruhi besar kecilnya kesempatan kerja yang berdampak pada pengangguran di Kota Tangerang. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja di Kota Tangerang mutlak diperlukan agar tenaga kerja Kota Tangerang dapat bersaing dengan tenaga kerja dari wilayah lain, terutama pada era pasar bebas saat ini;
2. ***Kemandirian tenaga kerja;*** Ketergantungan tenaga kerja terhadap lowongan pekerjaan, merupakan salah satu bukti masih belum mandirinya tenaga kerja di Kota Tangerang. Akibatnya lowongan kerja yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang berdampak pada peningkatan angka pengangguran. Kemandirian yang dimaksudkan adalah upaya tenaga kerja untuk dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, tanpa harus bergantung dari lowongan kerja yang tersedia. Melalui adanya kemandirian, diharapkan akan tercipta lapangan pekerjaan baru yang tidak hanya membawa manfaat bagi tenaga kerja tersebut, namun juga meningkatkan akses dan kesempatan kerja serta pertumbuhan perekonomian Kota Tangerang. Dalam upaya perwujudan

kemandirian, tenaga kerja di Kota Tangerang dituntut untuk memiliki kemampuan (*skill*) yang cukup dan kreatif.

3. **Akses dan kesempatan kerja.** Perluasan akses dan kesempatan kerja dibutuhkan untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Tangerang. Peningkatan akses tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dalam menanggulangi angka pengangguran. Perlu adanya inovasi baru dalam pelayanan kartu pencari kerja(AK-I) dalam bentuk *online*
4. **Perlindungan hukum bagi tenaga kerja;** Lemahnya peraturan hukum yang mengatur mengenai norma-norma ketenagakerjaan merupakan ancaman dalam upaya menjaga keharmonisan iklim pekerjaan. Lemahnya peraturan tersebut merupakan bukti belum terlindunginya hak-hak tenaga kerja di Kota Tangerang. Kondisi tersebut dapat menciptakan konflik yang akan merugikan tenaga kerja.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka dirumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, yaitu:

A. Peningkatan Kesempatan Kerja

Peningkatan kesempatan kerja akan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Meningkatkan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam menyerap lulusan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan bursa kerja (*job fair*) baik secara virtual maupun secara langsung dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perusahaan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- c. Mendorong perusahaan dalam kegiatan pemagangan, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu yang akan berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran.
- d. Mendorong perusahaan agar melakukan pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sehingga didapatkan data kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- e. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Luar Negeri (LPKLN)

dan Bursa Kerja Khusus (BKK) baik SMK maupun Perguruan Tinggi dalam rangka menyampaikan informasi peluang kerja di luar negeri dan mempersiapkan tenaga kerja dengan pelatihan Bahasa asing.

B. Peningkatan Kompetensi Dan Daya Saing Tenaga Kerja

Peningkatan kompetensi adalah kombinasi dari keterampilan, perilaku, sikap, dan pengetahuan yang ditunjukkan oleh seorang tenaga kerja dan calon tenaga kerja dengan baik. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang tinggi adalah salah satu sumber daya terpenting yang dapat dimiliki setiap perusahaan karena, mereka dapat berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan daya unggul perusahaan di dalam industrinya. Sedangkan calon tenaga kerja dengan kompetensi yang baik akan mendapat peluang kerja yang baik. Peningkatan Kompetensi Dan Daya Saing Tenaga Kerja akan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Peningkatan akreditasi program pelatihan pada Balai Latihan Kerja (BLK) dan penyesuaian program pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry.
- b. Peningkatan pembinaan dan Kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta dan LPK Perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
- c. Pelatihan berbasis kewirausahaan dalam rangka membentuk dan meningkatkan jumlah wirausaha baru yang berdampak pada penurunan angka pengangguran.
- d. Pembinaan Bursa Kerja Khusus baik di SMK maupun di Perguruan Tinggi melalui program Pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry.

C. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan terhadap tenaga dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Berikut prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja di antaranya :

- a. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
- b. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan;
- c. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha;
- d. Setiap mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat kemampuannya melalui pelatihan kerja;
- e. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri;
- g. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama;
- h. Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- i. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja;
- j. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 88 ayat (1) UU No. 13/2003 menyatakan dengan tegas dan jelas, “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. Hak-hak tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut sebagai berikut :

- a. Hak – Hak Karyawan
- b. Hak Memperoleh Upah.
- c. Hak Mendapatkan Kesempatan & Perlakuan yang Sama.
- d. Hak Mendapatkan Pelatihan Kerja.

- e. Hak Penempatan Tenaga Kerja.
- f. Hak Memiliki Waktu Kerja yang Manusiawi.
- g. Hak Mendapatkan Kesehatan & Keselamatan Kerja.
- h. Hak Mendapatkan Kesejahteraan.
- i. Hak Ikut Serta Dalam Serikat Pekerja/Buruh

Pada periode pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024-2026, perlindungan hak pekerja akan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Usulan penetapan upah minimum kota (UMK) sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku serta penerapan perlindungan tenaga kerja melalui monitoring kepatuhan pelaksanaan pemberian UMK dan jaminan kesehatan serta jaminan social ketenagakerjaan.
- b. Pemberian perlindungan tenaga kerja di luar negeri bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Kota Tangerang melalui kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (BP2MI).

D. Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hubungan industrial adalah hubungan pihak yang berkepentingan atas proses produksi baik barang maupun jasa di perusahaan. Hubungan industrial mengambil istilah dari "labour relation" atau hubungan perburuhan.

Pada periode pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024-2026, hubungan industrial akan dilaksanakan melalui sarana hubungan industrial yang terdiri dari :

- a. Pembinaan kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Pengusaha;
- c. Meningkatkan pembinaan kepada Lembaga Kerjasama Bipartit;
- d. Kerjasama dengan Lembaga Kerjasama Tripartit;
- e. Sosialisasi dan pengesahan Peraturan Perusahaan;
- f. Sosialisasi dan pengesahan Perjanjian Kerja Bersama;

- g. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan;
- h. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025

Telaahan terhadap rancangan akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan akhir RKPD.

Review terhadap rancangan akhir RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam RKPD;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Disajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan analisis;
4. Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam RKPD;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, dilakukan langkah berikut:
 - a. Pengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, ditentukan indikator yang akan dipilih;
 - b. Meneliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka dikaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian Renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya; dan

- c. Memberi catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), dilakukan langkah berikut:
 - a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis, dilakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra SKPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
 - b. Meneliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
 - c. Meneliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan akhir RKPD, target capaian Renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya;
 - d. Memberi catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
 8. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
 9. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Kota Tangerang

SKPD : Dinas Ketenagakerjaan

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				26.805.708.977,60					26.805.708.977,60	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Tangerang	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	20.405.190.124	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Tangerang	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	20.405.190.124	
		Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%				Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		
		Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%				Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%				Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		
		Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%				Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
		Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%				Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
		Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	100%				Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	100%		

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14.019.737.323	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14.019.737.323	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tangerang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	14.019.737.323	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tangerang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	14.019.737.323	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	4 jenis	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	4 jenis	-	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tangerang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	40 paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tangerang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	40 paket	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Tangerang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Tangerang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	-	

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tangerang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tangerang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tangerang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tangerang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	7 jenis	1.889.691.350	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	7 jenis	1.889.691.350	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	13.523.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	13.523.000	

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	159.567.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	159.567.900	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tangerang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	41.936.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tangerang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	41.936.600	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	943.984.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	943.984.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tangerang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	41.102.250	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tangerang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	41.102.250	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Tangerang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.775.600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Tangerang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.775.600	

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	686.802.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	686.802.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Tangerang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur daerah yang memadai	5 jenis	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Tangerang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur daerah yang memadai	5 jenis	-	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tangerang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tangerang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tangerang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tangerang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-	

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>unit</i>	<i>-</i>	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>unit</i>	<i>-</i>	
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>unit</i>	<i>-</i>	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>unit</i>	<i>-</i>	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tangerang	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	6 jenis	715.285.850	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tangerang	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	6 jenis	715.285.850	

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tangerang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit	264.806.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tangerang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit	264.806.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tangerang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	239.687.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tangerang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	239.687.100	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	184 unit	52.027.500	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	184 unit	52.027.500	

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	158.765.250	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	158.765.250	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tangerang	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	3 jenis	3.780.475.601	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tangerang	Tercapainya target dan peningkatan kinerja melalui Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.517.127.152	

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.493.400.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.493.400.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	652.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	652.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.384.962.912	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.384.962.912	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Tangerang	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga Kerja	2 dokumen	150.428.460.00	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Tangerang	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga Kerja	2 dokumen	150.428.460.00	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Tangerang	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2 jenis	150.428.460,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Tangerang	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2 jenis	150.428.460,00	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Tangerang	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	98.343.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Tangerang	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	98.343.000,00	

Rancangan Akhir RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro</i>	<i>8 perusahaan</i>	<i>52.085.460,00</i>	<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro</i>	<i>8 perusahaan</i>	<i>52.085.460,00</i>	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Tangerang	Prosentase Tenaga Kerja Terlatih Yang Bersertifikat Kompetensi	75,00 %	3.190.965.637,60	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Tangerang	Prosentase Tenaga Kerja Terlatih Yang Bersertifikat Kompetensi	75,00 %	3.190.965.637,60	
<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	<i>3 jenis</i>	<i>2.636.895.390,60</i>	<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	<i>3 jenis</i>	<i>2.636.895.390,60</i>	
<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berdasarkan Klaster Kompetensi</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	<i>380 orang</i>	<i>2.208.770.390,60</i>	<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berdasarkan Klaster Kompetensi</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	<i>380 orang</i>	<i>2.208.770.390,60</i>	

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Tangerang	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun	30 lembaga	28.125.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Tangerang	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun	30 lembaga	28.125.000	
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	32 unit	400.000.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	32 unit	400.000.000	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Tangerang	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12 bulan	184.379.500,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Tangerang	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12 bulan	184.379.500,00	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Tangerang	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 lembaga	184.379.500,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Tangerang	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 lembaga	184.379.500,00	

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Tangerang	Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	1 kegiatan	18.852.100	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Tangerang	Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	1 kegiatan	18.852.100	
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Tangerang	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 perizinan	18.852.100	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Tangerang	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 perizinan	18.852.100	
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Tangerang	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1 kegiatan	103.877.347	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Tangerang	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1 kegiatan	103.877.347	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	100 perusahaan	103.877.347	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	100 perusahaan	103.877.347	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	246.961.300	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	246.961.300	

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<i>Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah</i>	<i>280 Dokumen</i>	<i>246.961.300</i>	<i>Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah</i>	<i>280 Dokumen</i>	<i>246.961.300</i>	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Tangerang	Prosentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	98,84%	1.974.218.700	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Tangerang	Prosentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	98,84%	1.974.218.700	
<i>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>2 jenis</i>	<i>1.039.536.500,00</i>	<i>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>2 jenis</i>	<i>1.039.536.500,00</i>	
<i>Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>	<i>6750 orang</i>	<i>337.657.700,00</i>	<i>Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>	<i>6750 orang</i>	<i>337.657.700,00</i>	
<i>Perluasan Kesempatan Kerja</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>	<i>840 orang</i>	<i>701.878.800</i>	<i>Perluasan Kesempatan Kerja</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>	<i>840 orang</i>	<i>701.878.800</i>	

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Tangerang	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	12 Kegiatan	724.146.400	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Tangerang	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	12 Kegiatan	724.146.400	
Job Fair/ Bursa Kerja.	Kota Tangerang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	5000 orang	724.146.400	Job Fair/ Bursa Kerja.	Kota Tangerang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	5000 orang	724.146.400	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	12 kegiatan	210.535.800	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	12 kegiatan	210.535.800	
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indomesia (PMI)	Kota Tangerang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	170 orang	210.535.800	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indomesia (PMI)	Kota Tangerang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	170 orang	210.535.800	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Tangerang	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	69,23%	1.084.906.056	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Tangerang	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	69,23%	1.084.906.056	

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 kegiatan	199.553.656	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 kegiatan	199.553.656	
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	130 perusahaan	111.803.656	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	130 perusahaan	111.803.656	

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 perusahaan	43.200.000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 perusahaan	43.200.000	
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Tangerang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	9 laporan	44.550.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Tangerang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	9 laporan	44.550.000	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	5 kegiatan	885.352.400	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	5 kegiatan	885.352.400	

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	95 perkara	297.128.400	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	95 perkara	297.128.400	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	95 perkara	22.820.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	95 perkara	22.820.000	

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Tangerang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	41.892.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Tangerang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	41.892.000	
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	434.532.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	434.532.000	
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Tangerang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60 orang	88.980.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Tangerang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60 orang	88.980.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang (forum musyawarah perencanaan tahunan) baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disnaker telah diakomodir dalam program dan kegiatan Disnaker yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.



**DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA TANGERANG**

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Disnaker sebagai SKPD memiliki kewajiban untuk mewujudkan akuntabilitas kinerjanya, dimana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki makna perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, berdasarkan kebijakan yang telah disepakati maka program perlu ditetapkan dalam upaya pencapaian misi yang telah ditetapkan, program Renja SKPD identik dengan program pada Renstra SKPD.

Dengan tetap memperhatikan kebijakan, program adalah suatu upaya cara bertindak dalam upaya pencapaian misi, selama kurun waktu tertentu secara operasional (tahunan) dilaksanakan melalui kegiatan program. Tujuan program merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan program, setelah program dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. Tujuan program akan tercapai apabila sasaran program tercapai artinya bahwa tujuan program akibat dari sasaran program yang merupakan suatu pernyataan yang ingin dicapai pada tingkat program untuk kepentingan sekelompok masyarakat dan atau wilayah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, terdapat 5 agenda prioritas pembangunan nasional, yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur

Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan.

2. Pembangunan SDM

Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian

ibu kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi

3. Mendorong Investasi

Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya

4. Reformasi Birokrasi

Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga.

5. Penggunaan APBN

Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam RPJMN, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan nasional untuk mencapai kedaulatan pangan, ketersediaan energi dan pengelolaan sumber daya maritim serta kelautan dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah juga berkomitmen mengarahkan pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, dengan mendorong warga Indonesia memiliki jiwa gotong royong, dan harmonis dalam kehidupan antar kelompok sosial.

Pemerintah juga ingin agar postur perekonomian dapat sesuai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pertumbuhan berkualitas itu dicapai secara bersamaan dengan meraih keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, dan mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Dalam satu tahun pertama, agenda pembangunan bertujuan membangun fondasi untuk akselerasi pembangunan yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk agenda pembangunan lima tahun ke depan, pemerintah akan

meletakkan fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan selanjutnya.

Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Disnaker dan memiliki keterkaitan dengan visi Disnaker yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun *tangible*, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang. Adapun tujuan Disnaker adalah "Meningkatkan Kesempatan Kerja".

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Jumlah lowongan kerja	Lowongan kerja	20.000	20.000	20.000
		Tingkat Penempatan Tenaga Kerja (TPTK)	Persen	82,00%	83,00%	84,00%
	1.1 Terwujudnya kesempatan kerja yang luas	Terlaksananya Bursa Tenaga Fair	Kegiatan	12	12	12
	1.2 Meningkatnya kualitas dan daya saing produktivitas tenaga kerja	Terlaksananya pelatihan kerja	Orang	885	935	985



3.3 Program Dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnaker sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Selain itu juga program berarti kumpulan kegiatan yang sistemis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat tertentu untuk mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan oleh Disnaker pada tahun 2025 sebanyak 5 (lima) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Kerja;
4. Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas;
5. Program Hubungan Industrial.

Kegiatan adalah perwujudan dari program Disnaker sebagai bagian dari pencapaian program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku (fleksibel).

Berdasarkan program-program yang telah ditetapkan Disnaker, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Disnaker pada tahun 2025, yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota**, ada 8 (delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penanganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Pemerintah Daerah;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. **Program Perencanaan Tenaga Kerja.** Ada 1 (satu) kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu :
- a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
3. **Program Penempatan Tenaga Kerja,** ada 3 (tiga) kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :
- a. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - c. Pelindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota.
4. **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,** ada 5 (lima) kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi;
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - c. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 - d. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil;
 - e. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
5. **Program Hubungan Industrial,** ada 2 (dua) kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :
- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.2.

Rumusan dan Rencana Program Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				27.071.970.562				27.364.975.443
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tangerang	100%	20.232.237.562	APBD			20.405.190.124
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tangerang	16 Dokumen	500.000	APBD		16 Dokumen	500.000
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tangerang	9 Dokumen	500.000	APBD		9 Dokumen	500.000

*Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tangerang	1 Tahun	13.270.476.402	APBD		100%	14.019.737.323
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tangerang	40 Orang/Bulan	13.270.476.402	APBD		40 Orang/Bulan	14.019.737.323
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Kota Tangerang	6 Dokumen	500.000	APBD		6 Dokumen	500.000
2	07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Tangerang	12 Laporan	500.000	APBD		12 Laporan	500.000
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Kota Tangerang	12 Dokumen	23.056.000	APBD		12 Dokumen	12.000.000
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Kota Tangerang	40 paket	23.056.000	APBD		40 paket	12.000.000

**Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya target dan peningkatan kinerja melalui layanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tangerang	100%	2.057.554.50	APBD		100%	1.857.524.750
2	07	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Tangerang	1 paket	13.171.700	APBD		1 paket	13.523.000
2	07	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kota Tangerang	1 paket	188.075.700	APBD		1 paket	148.970.100
2	07	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Kota Tangerang	1 paket	42.550.400	APBD		1 paket	40.853.600
2	07	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Kota Tangerang	1 paket	1.005.355.900	APBD		1 paket	943.984.000
2	07	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	Kota Tangerang	1 paket	29.548.00	APBD		1 paket	33.175.000
2	07	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Kota Tangerang	12 dokumen	1.504.800	APBD		12 dokumen	1.821.600
2	07	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kerjasama dengan media massa (lokal, nasional) dalam	Kota Tangerang	12 laporan	777.348.000	APBD		12 laporan	675.197.450

*Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						publikasi advertorial informasi pembangunan perangkat daerah yang diadakan							
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur daerah yang memadai	Kota Tangerang	1 Kegiatan	53.376.800	APBD		1 Kegiatan	20.166.600
2	07	01	2.07	06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Tangerang	6 unit	53.376.800	APBD		unit	20.166.600
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kota Tangerang	3 jenis	3.997.821.760	APBD		3 jenis	3.780.475.601
2	07	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tangerang	12 laporan	5.500.000	APBD		12 laporan	5.493.400.00
2	07	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Tangerang	12 laporan	870.922.080	APBD		12 laporan	769.000.000
2	07	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Tangerang	12 laporan	3.121.399.680	APBD		12 laporan	3.005.982.201

*Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	Kota Tangerang	100%	828.952.100	APBD		100%	714.285.850
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Tangerang	19 unit	234.706.000	APBD		19 unit	264.806.000
2	07	01	208	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Tangerang	10 unit	269.487.100	APBD		10 unit	239.687.100
2	07	01	208	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Tangerang	71 unit	45.893.000	APBD		71 unit	51.027.500
2	07	01	208	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Tangerang	5 unit	278.866.000,	APBD		5 unit	158.765.250
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	Kota Tangerang	100%	63.092.600	APBD		100%	163.408.126

*Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	02	201		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Tangerang	2 dokumen	63.092.600	APBD		2 dokumen	163.408.126
2	07	02	201	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	<i>Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</i>	Kota Tangerang	1 dokumen	34.842.600	APBD		1 dokumen	49.900.000
2	07	02	201	02	<i>Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro</i>	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Kota Tangerang	30 orang	28.250.000	APBD		30 Orang	113.508.126
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja Terlatih Yang Bersertifikat Kompetensi	Kota Tangerang	82,14%	3.425.749.800	APBD		82,14%	3.466.296.959
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Tangerang	20 kegiatan	2.918.489.200	APBD		20 kegiatan	2.959.036.159

**Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kota Tangerang	380 orang	2.548.580.100	APBD		380 orang	2.530.911.159
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kota Tangerang	30 lembaga	31.581.000	APBD		30 lembaga	28.125.000
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kota Tangerang	32 unit	338.328.100	APBD		32 unit	400.000.000
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Tangerang	4 kegiatan	133.934.100	APBD		4 kegiatan	263.172.400
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kota Tangerang	5 lembaga	133.934.100	APBD		25 lembaga	263.172.400
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Tangerang	1 kegiatan	172.484.900	APBD		5 kegiatan	13.327.100

*Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	03	203	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Tangerang	5 perizinan	172.484.900	APBD		5 perizinan	13.327.100
2	07	03	204		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Tangerang	3 Kegiatan	47.075.800	APBD		3 kegiatan	29.240.900
2	07	03	204	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kota Tangerang	100 perusahaan	47.075.800	APBD		80 perusahaan	29.240.900
2	07	03	205		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	1 kegiatan	153.765.800	APBD		1 kegiatan	201.520.400
2	07	03	205	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kota Tangerang	280 Dokumen	153.765.800	APBD		1 Dokumen	201.520.400
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan		98,84%	2.196.174.800	APBD		98,84%	2.144.563.450
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	2 jenis	1.188.094.800	APBD		2 jenis	1.383.638.850

*Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Tangerang	6750 orang	230.665.600	APBD		6750 orang	337.657.700
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Tangerang	840 orang	957.429.200	APBD		840 orang	1.045.981.150
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Tangerang	12 Kegiatan	833.670.400	APBD		12 Kegiatan	550.388.800
2	07	04	2.03	03	Job Fair/ Bursa Kerja.	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Kota Tangerang	5000 orang	833.670.400	APBD		5000 orang	550.388.800
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	3 kegiatan	174.409.600	APBD		3 kegiatan	210.535.800
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kota Tangerang	270 orang	174.409.600	APBD		220 orang	210.535.800

*Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025*

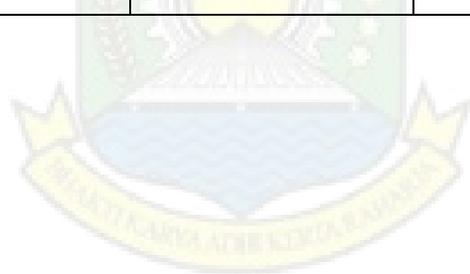
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan		69,23%	1.084.906.056	APBD		68%	1.185.516.784
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	4 kegiatan	418.865.200	APBD		4 kegiatan	199.553.656
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kota Tangerang	130 perusahaan	121.139.600	APBD		130 perusahaan	111.803.656
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kota Tangerang	25 perusahaan	8.375.600	APBD		25 perusahaan	43.200.000
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai	Kota Tangerang	9 Laporan	289.350.000	APBD		9 Laporan	44.550.000

*Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<i>Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>							
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Tangerang	5 kegiatan	735.850.600,0	APBD		5 kegiatan	985.963.128
2	07	05	2.02	01	<i>Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>95 perkara</i>	<i>447.311.800</i>	<i>APBD</i>		<i>95 perkara</i>	<i>397.739.128</i>
2	07	05	2.02	02	<i>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>95 perkara</i>	<i>51.385.200</i>	<i>APBD</i>		<i>95 perkara</i>	<i>22.820.000</i>

*Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2025*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kota Tangerang	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20.026.800	APBD		12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	41.892.000
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kota Tangerang	1 lembaga	192.000.000	APBD		1 lembaga	434.532.000
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Tangerang	60 orang	25.126.800	APBD		60 orang	88.980.000



BAB IV

RENCANA KERJA

DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Renja berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan merupakan bagian yang utuh dari RPJMD Kota Tangerang dan Renstra Dinas Ketenagakerjaan. Dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Renja.

Program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2025 diperlihatkan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025					Cata tan Penti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								27.071.970.562					27.071.970.561,91
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							27.071.970.562					26.805.708.977,60
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A						20.232.237.562	APBD				20.405.190.124,00
				Tingkat Ketersedia an Dokumen Perencana an, Pengangga ran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100%	500.000	APBD	Tingkat Ketersedia an Dokumen Perencana an, Pengangga ran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	500.000

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tersedia dokumentasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tangerang			16 dokumen	500.000	APBD		Tersedia dokumentasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 dokumen	500.000							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Tangerang		9 dokumen		500.000	APBD		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	500.000							
		Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							100%		13.270.476.402	APBD	Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	14.019.737.323						
2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	13.270.476.402	APBD		Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14.019.737.323	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima							Jumlah Orang yang Menerima	40 Orang/Bulan	13.270.476.402	APBD		Jumlah Orang yang Menerima	40 Orang/Bulan	14.019.737.323

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Cata tan Penti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
			Gaji dan Tunjangan ASN										Gaji dan Tunjangan ASN		
		Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100%			500.000	APBD		Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	500.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Tangerang			6 dokumen	500.000	APBD		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 dokumen	500.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Tangerang		12 laporan		500.000	APBD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	500.000	
		Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat				100%			23.056.000	APBD		Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat	100%	12.000.000	

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Cata tan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
		Daerah											Daerah		
				Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Kota Tangerang			12 Dokumen	23.056.000	APBD		Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	12 Dokumen	12.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya		Kota Tangerang		40 Paket		23.056.000	APBD		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	40 Paket	12.000.000	
		Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kota Tangerang	100%				APBD		Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.857.524.750	

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Cata tan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
2.07.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Tangerang			7 jenis	2.057.554.500	APBD		Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	7 jenis	1.857.524.750	
2.07.01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Tangerang			1 paket	13.171.700	APBD		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	13.523.000	
2.07.01.2.05.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Tangerang			1 paket	188.075.700	APBD		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	148.970.100	
2.07.01.2.05.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kota Tangerang			1 paket	42.550.400	APBD		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	40.853.600	

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cata tan Penti ng	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.07.01.2.05.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Tangerang		1 paket		1.005.355.900				1 paket	943.984.000
2.07.01.2.05.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Tangerang		1 paket		29.548.000				1 paket	33.175.000
2.07.01.2.05.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kota Tangerang		12 dokumen		1.504.800				1 dokumen	1.821.600
2.07.01.2.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Tangerang		12 laporan		777.348.000				12 laporan	675.197.450

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Cata tan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
		Tingkat Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah			Kota Tangerang	100%			53.376.800-			Tingkat Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	100%	20.166.600	
2	07 01 2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Tersedia sarana dan prasarana aparatur daerah yang memadai	Kota Tangerang			1 kegiatan	53.376.800	APBD		Tersedia sarana dan prasarana aparatur daerah yang memadai	1 kegiatan	20.166.600	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Tangerang		8 Unit		53.376.800			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.166.600-	
		Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah			Kota Tangerang	100%			3.997.821.760			Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.780.475.601	

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Cata tan Penti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kota Tangerang			3 jenis	3.997.821.760	APBD		Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	3 jenis	3.780.475.601	
2 07 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Tangerang		12 Laporan		5.500.000	APBD		Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 Laporan	5.493.400	
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Tangerang		12 Laporan		870.922.080	APBD		Jumlah jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	769.000.000	
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Tangerang		12 laporan		3.121.399.680	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.005.982.201	

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Cata tan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target			
					Kota Tangerang	100%			828.952.100	APBD		Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	714.285.850			
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	Kota Tangerang			4 Jenis	828.952.100	APBD	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100%	714.285.850
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Tangerang			19 unit	234.706.000	APBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit	264.806.000

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Cata tan Penti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang disediakan		Kota Tangerang		10 unit		269.487.100	APBD		Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	9 unit	239.687.100	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Tangerang		71 unit		45.893.000	APBD		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	184 unit	51.027.500	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Kota Tangerang		5 unit		278.866.000	APBD		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	158.765.250	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga Kerja							63.092.600			Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga Kerja	100%	150.428.460	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Kota Tangerang			2 dokumen	63.092.600	APBD		Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2 dokumen	163.408.126	

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Cata tan Penti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro)		Kota Tangerang		1 dokumen		34.842.600	APBD		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	49.900.000	
2 07 02 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro		Kota Tangerang		30 orang		28.250.000	APBD		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	30 orang	113.508.126	
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja Terlatih Yang Bersertifikat Kompetensi						82,14%	3.425.749.800			Prosentase Tenaga Kerja Terlatih Yang Bersertifikat Kompetensi	82,14 %	3.466.296.959	
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			Pelaksanaa n Pelatihan berdasarka n Unit Kompetensi	Kota Tangerang		20 Kegiatan		2.918.489.200	APBD		Pelaksanaa n Pelatihan berdasarka n Unit Kompetensi	20 Kegiatan	2.959.036.159	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun		Kota Tangerang		380 orang		2.548.580.100			Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih	380 orang	2.530.911.159	

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025						Cata tan Penti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
	Kompetensi		n													
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakat an/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kota Tangerang		30 lembaga	31.581.000	APBD		Jumlah Kesepakat an/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas	30 lembaga	28.125.000
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kota Tangerang		32 unit	338.328.100	APBD		Jumlah sarana pelatihan kerja yang diadakan	32 unit	400.000.000,00
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Tangerang		4 kegiatan	133.934.100	APBD		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	4 kegiatan	263.172.400
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Tangerang		5 lembaga	133.934.100	APBD		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	25 lembaga	263.172.400

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Cata tan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
			Swasta yang Dibina										Swasta yang Dibina		
2	07 03 2.03			Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Tangerang			1 kegiatan	172.484.900				Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	1 kegiatan	13.327.100
2	07 03 2.03 01		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Tangerang			5 perizinan	172.484.900				Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 perizinan	13.327.100
2	07 03 2.04			Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Tangerang			3 kegiatan	47.075.800				Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1 kegiatan	29.240.900
2	07 03 2.04 01		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Tangerang			100 perusahaan	47.075.800				Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	80 perusahaan	29.240.900

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025						Cata tan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Terlaksanaya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang			1 kegiatan	153.765.800	APBD		Terlaksananya Pengukuran Produktivitas	1 kegiatan	201.520.400
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah		Kota Tangerang		280 Dokumen		153.765.800			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah	1 Dokumen	201.520.400
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan							2.196.174.800			Prosentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	98,84 %	2.144.563.450
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang		2 jenis		1.188.094.800	APBD		Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2 jenis	1.383.638.850

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Cata tan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		Kota Tangerang		6750 orang		230.665.600	APBD		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	6750 orang	337.657.700	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		Kota Tangerang		840 orang		957.429.200	APBD		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	840 orang	1.045.981.150	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Kota Tangerang		12 Kegiatan		833.670.400	APBD		Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	12 Kegiatan	550.388.800	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		Kota Tangerang		5000 Orang		833.670.400	APBD		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	5000 Orang	550.388.800	

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025						Cata tan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang			3 kegiatan	174.409.600	APBD			3 kegiatan	210.535.800
2.07.04.2.04.03	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		Kota Tangerang		270 orang		174.409.600	APBD		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	150 orang	210.535.800
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan							1.154.715.800				68%	1.185.516.784
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Kota Tangerang			4 kegiatan	418.865.200	APBD		Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	4 kegiatan	199.553.656

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
				untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota									untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan					130 Perusahaan	121.139.600	APBD	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	130 Perusahaan	111.803.656
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan					25 Perusahaan	8.375.600	APBD	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 Perusahaan	43.200.000

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025						Cata tan Penti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupaha n		Kota Tangeran g		9 Laporan		289.350.000	APBD		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupaha n	9 Lapora n	44.550.000
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaa n Pencegaha n dan Penyelesaia n Perselisiha n Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota		Kota Tangeran g		5Kegiata n		735.850.600	APBD			5 Kegiata n	985.963.128

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cata tan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah		Kota Tangerang	95 perkara			447.311.800	APBD		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	95 perkara	397.739.128
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		Kota Tangerang	95 perkara			51.385.200	APBD		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	95 perkara	22.820.000
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		Kota Tangerang		12 Asosiasi dan Serikat Pekerja		20.026.800	APBD		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	41.892.000

*Rancangan
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		Kota Tangerang		1 lembaga		192.000.000	APBD		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	434.532.000
2 07 05 2.02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Kota Tangerang		60 orang		25.126.800	APBD		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60 orang	88.980.000



DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA TANGERANG

BAB V

PENUTUP

Renja Disnaker Kota Tangerang merupakan acuan bagi seluruh unit kerja/bidang yang ada di lingkungan Disnaker dalam pelaksanaan kegiatan 1 (satu) tahunan dan diharapkan Renja Disnaker mampu menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 terlaksana dengan baik.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renja Disnaker Kota Tangerang Tahun 2025 memuat kebijakan serta rencana program/kegiatan Disnaker Tahun 2025 yang merupakan turunan dari arah kebijakan Kota Tangerang di tahun 2025 agar pelaksanaan program dan kegiatan Disnaker sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah di Tahun 2025;
2. Renja Disnaker Kota Tangerang Tahun 2025 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Disnaker, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Disnaker;
3. Renja Disnaker Kota Tangerang Tahun 2025 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2025;
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kota Tangerang, keberadaan Renja Disnaker harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Disnaker (RKA-Disnaker).